



KR-Antara/Makna Zaezar

KONVERSI MOTOR LISTRIK: Pengunjung memfoto motor bensin yang diubah menjadi motor listrik dalam pameran dan promosi IKM kendaraan konversi motor listrik di SMK IPT Karangpanas, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/10/2024). Pameran tiga hari oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA) berkolaborasi dengan Pemkot Semarang tersebut bertujuan untuk memberikan wadah promosi bagi para pelaku mekanik Industri Kecil Menengah (IKM) serta pelajar yang melakukan inovasi di sektor kendaraan listrik roda dua maupun roda tiga.

MENPERIN SOAL PAILITNYA SRITEX

Pemerintah Ambil Langkah Selamatkan Karyawan

JAKARTA (KR) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, Pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) usai perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Menperin menurukan, prioritas Pemerintah saat ini menyelamatkan karyawan PT Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK). "Pemerintah segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK," kata Agus Gumiwang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (25/10).

Menperin mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan,

bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex. "Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," tuturnya.

Sebelumnya, Rabu (23/10), Pengadilan Niaga Semarang memutuskan pailit PT Sri Rejeki Isman (Sritex), setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditur pe-

rusahaan tekstil tersebut. Salah satu debitur PT Sritex, yakni PT Indo Bharat Rayon, mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian atas kesepakatan penundaan kewajiban pembayaran utang pada 2022. "Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada Januari 2022 lalu," kata Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi di Semarang, Jawa Tengah.

Sementara itu Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau dikenal sebagai Sritex mengajukan kasasi terkait putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, Jawa Tengah. Pengajuan kasasi tersebut dilakukan oleh Manajemen Sritex sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelang-

gan, karyawan dan pemasok. "Kami menghormati putusan hukum tersebut, dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya.

Disampaikan Manajemen, kasasi tersebut sudah diajukan ke Mahkamah Agung (MA) per hari ini, dengan harapan bisa menyelesaikan persoalan pailit dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para pemangku kepentingan.

Sritex selama 58 tahun telah menjadi bagian dari industri tekstil Indonesia. Sebagai perusahaan terbesar di Asia Tenggara, Manajemen Sritex menyatakan telah berkontribusi besar bagi Tanah Air.

(Ant/Has)-d

KORUPSI DANA HIBAH JATIM

KPK Periksa Anggota DPRD Sampang

JAKARTA (KR) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota DPRD Kabupaten Sampang 2019-2024 Fauzan Adima dalam statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur 2021-2022. Pemeriksaan yang dijadwalkan berlangsung di Rutan Sampang pada Kamis (24/10) terpaksa ditunda karena yang bersangkutan tidak didampingi oleh kuasa hukumnya.

"Diperiksa sebagai tersangka. Tersangka hadir namun tak didampingi penasihat hukum sehingga penyidik belum bisa masuk pada materi perkara," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (25/10).

Penyidik selanjutnya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Fauzan Adima, namun belum memberikan keterangan soal jadwal barunya. KPK pada Jumat, 12 Juli 2024, mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2019-2022.

(Ant/Has)-d

DUGAAN PELANGGARAN PEMILU

DKPP Terima 565 Aduan

MAKASSAR (KR) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melansir sebanyak 565 aduan dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu diterima per 25 Oktober 2024. Angka ini naik dua kali lipat dari jumlah aduan diterima DKPP pada 2023 yang mencapai 325 aduan.

"Dari pengalaman DKPP, jumlah aduan pelanggaran etik saat pilkada jauh lebih tinggi dibanding pemilu. Ini yang ingin kami tekan dengan mengadakan rakor penyelenggara pemilu," kata Ketua DKPP Hedy Lugito saat rapat koordinasi tersebut di Makassar Sulawesi Selatan, Jumat (25/10).

Menurutnya, rakor ini sangat penting untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang berintegritas. Selain itu juga sebagai langkah

preventif untuk menekan tingginya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam pelaksanaan pilkada tahun ini.

"Bulan Oktober 2024 masih berjalan, tapi aduan yang diterima DKPP sudah mencapai 173 persen dari jumlah aduan yang diterima pada 2023. Oleh karena itu, kami ingin menjadikan rakor ini sebagai penguat bagi penyelenggara pemilu untuk bekerja dengan baik dalam Pilkada 2024," papar Heni.

Rakor ini diadakan, lanjutnya, untuk membangun pemahaman yang sama tentang implementasi kode etik penyelenggara pemilu menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024. "DKPP ingin semua penyelenggara pemilu memiliki frekuensi yang sama ten-

g pentingnya menjaga integritas demi terwujudnya Pilkada 2024 yang berintegritas," tambahnya.

Kegiatan Rakor Penyelenggara Pemilu tersebut berlangsung 24-26 Oktober 2024 menghadirkan 518 penyelenggara pemilu terdiri dari para ketua KPU tingkat provinsi sebanyak 21 orang, para ketua Bawaslu tingkat provinsi 21 orang, dan sebanyak 238 orang para ketua KPU dan Bawaslu tingkat kabupaten/kota.

Sebanyak 518 peserta ini mendapatkan sejumlah materi dari narasumber kredibel, di antaranya Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, pejabat Kemendagri, Kapolda Sulawesi Selatan, Panglima Kodam XIV/ Hasanuddin, dan Anggota DKPP periode 2012-2017 Nur Hidayat Sardini.

(Ant/Has)-f

KORUPSI MANTAN GUBERNUR MALUKU UTARA

Ditelusuri, Aliran Dana ke Yayasan Alkhairaat

JAKARTA (KR) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami soal dugaan adanya aliran uang hasil korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) ke Yayasan Alkhairaat. Hal tersebut didalami penyidik dengan memeriksa Ketua Pengurus Besar Yayasan Alkhairaat Asgar Khan pada Kamis (24/10) di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan.

"Saksi hadir dan didalami terkait dengan dugaan adanya aliran uang tersangka AGK ke Yayasan Alkhairaat untuk pembangunan gedung," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (25/10).

Namun, penyidik KPK belum membuka soal materi apa saja yang didalami dalam pemeriksaan tersebut. Untuk diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ternate menjatuhkan vonis 8 tahun penjara terhadap mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) dalam kasus suap dan gratifikasi di lingkungan Pemprov

Malut.

"Menetapkan terdakwa Abdul Gani Kasuba untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp109,056 miliar dan 90.000 dolar Amerika Serikat dengan ketentuan jika Terdakwa Abdul Gani Kasuba tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap," kata ketua Majelis Hakim, Kadar Nooh saat membacakan putusan di PN Ternate, Kamis (26/9).

Sidang Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte tersebut dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Kadar Noh dengan hakim anggota Budi Setyawan, Khadijah A. Rumalean, Samhadi, dan Yakob memberikan kesempatan kepada terdakwa AGK dan JPU untuk bersikap atas putusan PN tersebut.

Majelis hakim dalam perkara ini memutuskan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Gani Kasuba berupa pidana penjara selama 8 tahun serta pidana denda sejumlah Rp 300 juta dengan subsidi 6 bulan kurungan.

(Ant/Has)-f

Penganiayaan 2 Santri, Polisi Amankan 2 Laki-laki

YOGYA (KR) - Terkait peristiwa di Prawirota-man dalam kasus penganiayaan dan penusukan dua santri Pondok Pesantren Krapyak, Polresta Yogyakarta sudah melakukan penyelidikan dan mengamankan dua orang laki-laki berusia 35 tahun, pekerjaan swasta dari warga Indonesia Timur dan saat ini masih dalam pemeriksaan Sat Reskrim Polresta Yogya.

"Pemeriksaan untuk mengetahui secara jelas rangkaian peristiwa sekaligus untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut," tutur Kapolresta Yogya Kombes Pol Aditya Surya Dharma SIK MH, Jumat (25/10).

Dikatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman termasuk mencari tahu apakah ada pelaku lainnya. "Kita

amankan dua orang dan masih dalam pengembangan, mohon doanya untuk bisa kita dapatkan tersangka lain," jelas Kapolresta.

Aditya mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas Kota Yogya. "Percaya-pemangan ini kepada kami (Polresta), hindari hal-hal yang bisa menimbulkan konflik produktif, mari sama-sama kita menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas Kota Yogya," tegasnya.

Sebelumnya Kasi Humas Polresta Yogya AKP Sujarwo menyebutkan kronologi kejadiannya, pada Rabu (23/10) pukul 21.25 WIB ada rombongan remaja sekitar 25 orang tengah nongkrong dan minum minuman keras di sebuah kafe Jalan Parangtritis, Bron-

tokusuman, Mergangsan.

Kemudian dari rombongan tersebut ada yang melempar gelas ke jalan dan ada beberapa orang dari rombongan tersebut yang menyebarkan ke arah Barat tempat orang jualan sate. "Hingga terjadi penusukan dengan senjata tajam terhadap salah seorang pembeli sate," paparnya.

Sementara Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor DIY menyebutkan kedua santri diduga menjadi korban salah sasaran karena pelaku mabuk miras. Selanjutnya menyatakan sikap untuk mendorong dan mempercayakan sepenuhnya pada polisi untuk menangkap pelaku, dan menginstruksikan pada semua kader GP Ansor dan Banser untuk tetap menjaga situasi aman dan kondusif. (Vin)-f

Alkap DPRD DIY Terbentuk

YOGYA (KR) - DPRD DIY berhasil menyusun Alat Kelengkapan (Alkap) masa jabatan 2024-2029. Proses pembentukan susunan personel berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD DIY di Ruang Rapat Paripurna, Jumat (25/10).

Proses penyusunan berlangsung lancar dan selesai saat itu juga. Ketua Komisi A DPRD DIY kembali diduduki Eko Suwanto. Ketua Komisi B Andriana Wulandari, Ketua Komisi C Nur Subiantoro, dan Ketua Komisi D RB Dwi Wahyu.

Untuk Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa adalah Yuni Satia Rahayu dan Ketua Badan Kehormatan (BK) Sofyan Setya Darmawan.

Ketua DPRD DIY Nuryadi mengatakan, lancarnya pembentukan Alkap tersebut karena sudah ada komunikasi antarfraksi. "Setelah ini teman-teman komisi bisa langsung bekerja," ujarnya.

Pekan depan semua anggota komisi juga langsung rapat internal dan koordinasi dengan Badan Anggaran dan Badan Musyawarah hingga koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Apalagi batas waktu penetapan APBD ada di tanggal 30 November. "Jadi harus segera berkomitmen mana saja yang dipersiapkan. Karena memang kerjaan sudah menanti di depan mata," ungkapnya.

Mengenai pekerjaan yang sudah menanti, Nuryadi menyatakan, hal itu sudah masuk ke ranah komisi.

Beberapa pekerjaan harus diselesaikan akhir tahun. Sembari menyusun rencana pekerjaan dan anggaran untuk tahun depan. Jadi komunikasi antara legislatif dan eksekutif harus berjalan baik. Penyusunan anggaran dan jadwal masih akan dilihat. Sambal melihat anggaran dan jadwal dari tahun sebelumnya. (Awh)-f



KR-Franz Boedisukamanto

Ketua DPRD DIY Nuryadi Spd menandatangani naskah keputusan DPRD DIY tentang susunan personalia keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD DIY.